

Analisis Pembagian Kewenangan dan Pemerataan Anggaran Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Tria Puspa Kirana Timantiotiningrum¹, Dwi Cahyaningdyah²
Universitas Negeri Semarang^{1,2}

*Email Korespondensi: triapuspakirana@students.unes.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 10-10-2026
Disetujui 16-10-2026
Diterbitkan 18-10-2026

ABSTRACT

Education budgeting plays an important role in supporting school facilities, teacher needs, learning activities, and equitable access to educational services. However, differences in authority among provincial, city, and regency governments, as well as disparities in regional fiscal capacity, may affect the equitable distribution of education funding. This article aims to analyze the respective roles of provincial, city, and regency governments in education budgeting and their implications for equitable school services. It employs a literature review method by examining scientific articles on education budgeting, decentralization, school financing, and regional development planning. The literature is reviewed based on its relevance to the topic, particularly the division of authority, regional fiscal capacity, budget planning, management transparency, and school needs. The findings indicate that the division of authority provides the foundation for education budgeting but is insufficient to guarantee equitable school services. Regional fiscal capacity, accurate budget planning, transparent management, and the alignment of funding allocations with school needs also influence educational equity. Therefore, education budgeting should focus not only on compliance with budgetary regulations but also on delivering tangible benefits to schools and students.

Keywords: Education Budgeting; School Financing; Regional Government; Education Decentralization; Educational Equity

ABSTRAK

Penganggaran pendidikan berperan penting dalam mendukung ketersediaan fasilitas, pemenuhan kebutuhan guru, kegiatan belajar, dan pemerataan layanan sekolah. Namun, perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten serta ketimpangan kemampuan keuangan daerah dapat memengaruhi pemerataan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan peran pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten dalam penganggaran pendidikan serta kaitannya dengan pemerataan layanan sekolah. Penulisan artikel menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah artikel ilmiah yang membahas anggaran pendidikan, desentralisasi, pembiayaan sekolah, dan perencanaan pembangunan daerah. Literatur dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan topik dan relevansinya terhadap pembagian kewenangan, kapasitas fiskal daerah, perencanaan anggaran, transparansi pengelolaan, dan kebutuhan sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan menjadi dasar penyelenggaraan anggaran pendidikan, tetapi belum cukup untuk menjamin pemerataan layanan sekolah. Kapasitas fiskal daerah, ketepatan perencanaan, transparansi pengelolaan, dan kesesuaian alokasi dana dengan kebutuhan sekolah turut menentukan pemerataan tersebut. Dengan demikian, penganggaran pendidikan perlu berorientasi tidak hanya pada pemenuhan ketentuan anggaran, tetapi juga pada manfaat nyata bagi sekolah dan peserta didik.

Kata kunci: Anggaran Pendidikan; Pembiayaan Sekolah; Pemerintah Daerah; Desentralisasi Pendidikan; Pemerataan Pendidikan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Timantiotiningrum, T. P. K. ., & Cahyaningdyah, D. . (2026). Analisis Pembagian Kewenangan dan Pemerataan Anggaran antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11445-11452. <https://doi.org/10.63822/22vm2k80>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam kemajuan suatu daerah. Akan tetapi dalam nyatanya penyelenggaraan Pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan Gedung sekolah dan tenaga pengajar. Sekolah juga membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan belajar, merawat fasilitas, menyediakan perlengkapan pembelajaran, dan memenuhi berbagai kebutuhan operasional lainnya. Karena itu, penganggaran pendidikan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Di Indonesia sendiri tanggung jawab pembiayaan Pendidikan tidak hanya berada pada satu wadah yaitu pemerintah pusat, akan tetapi dalam penyelenggaraanya pembiayaan Pendidikan dipegang beberapa wadah yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota yang dimana pemerintahan tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Pembagian tersebut membuat penganggaran pendidikan memiliki hubungan erat dengan kebijakan desentralisasi dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam artikel JahJa (2007) didalamnya membahas kebijakan pemerintah daerah dalam anggaran sektor pendidikan dan menekankan pentingnya kontribusi pemerintah daerah bagi pengembangan pendidikan.

Pada kenyataanya setiap daerah memiliki kondisi anggaran yang berbeda-beda. Ada beberapa daerah yang memiliki pendapatan hasil daerah yang cukup besar sehingga daerah tersebut tidak bergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan beberapa daerah lain masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, termasuk penyediaan layanan pendidikan. Oleh sebab itu, besarnya anggaran pendidikan belum tentu menggambarkan kondisi sekolah secara keseluruhan. Hal lain dapat dilihat juga pada anggaran yang tersedia tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sekolah yang memiliki bangunan rusak, jumlah peserta didik yang terus bertambah, dan bahkan akses geografis yang sulit seharusnya membutuhkan dukungan berbeda dari sekolah yang kondisinya lebih memadai. Jika alokasi dana hanya mengikuti pola pembagian yang seragam, kebutuhan khusus tersebut berisiko kurang diperhatikan.

Afridzal, Abdullah, Saputra, dan Hasnawati (2018) membahas anggaran pendidikan, kepatuhan terhadap regulasi, dan intervensi pemerintah. Kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan anggaran pendidikan perlu dilihat bukan hanya dari ketentuan yang berlaku, melainkan juga dari pelaksanaannya di tingkat pemerintah daerah. Dengan kata lain, kebijakan anggaran perlu dihubungkan dengan kondisi nyata yang dihadapi penyelenggara pendidikan. Kajian tentang perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan juga menunjukkan pentingnya menempatkan pendidikan dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas (Septiana & Salahudin, 2021). Artinya, anggaran pendidikan seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini membahas tiga hal. Pertama, bagaimana pembagian peran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam penganggaran pendidikan. Kedua, bagaimana perbedaan kemampuan keuangan daerah dapat memengaruhi pemerataan layanan sekolah. Ketiga, langkah apa yang dapat dilakukan agar penganggaran pendidikan lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan berfokus pada pemahaman terhadap hasil penelitian terdahulu, kebijakan anggaran pendidikan, dan hubungan antara kewenangan pemerintah daerah dengan pembiayaan sekolah. Bahan kajian diarahkan pada

artikel ilmiah yang membahas anggaran pendidikan, pembiayaan sekolah, desentralisasi pendidikan, perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan pendidikan.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam tiga tema, yaitu pembagian kewenangan penganggaran, perbedaan kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan anggaran berdasarkan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, gagasan dari berbagai sumber dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan persoalan yang masih perlu mendapat perhatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Peran Pemerintah Dalam Penganggran Pendidikan

Penganggaran Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa pembagian tersebut yaitu pada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tingkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan tersebut penting karena menentukan pihak yang merencanakan program, mengalokasikan dana, serta mengawasi pelaksanaan layanan pendidikan.

Secara umum pemerintah provinsis berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sesuai dengan pembagian tugasnya. Sementara itu, pemerintahan kabupaten atau kota bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pembagian ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya. Pembagian kewenangan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penyusunan anggaran. Pemerintah provinsi perlu memperhatikan kebutuhan sekolah menengah dan pendidikan khusus yang berada dalam kewenangannya. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan kebutuhan sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan layanan pendidikan lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Walaupun pembagian kewenangan sudah ditetapkan, kebutuhan sekolah tidak selalu dapat dipenuhi hanya melalui satu sumber pendanaan. Sekolah dapat menerima dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan. Karena itu, perencanaan anggaran perlu memperhatikan hubungan antarsumber pendanaan agar tidak terjadi tumpang tindih program atau kebutuhan penting yang justru terlewat.

JahJa (2007) memberikan dasar pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam anggaran sektor pendidikan. Sementara itu, Afridzal et al. (2018) mengarahkan perhatian pada hubungan antara anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelaksanaan kebijakan. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anggaran tidak berhenti pada penetapan nominal, tetapi juga menyangkut keputusan pemerintah dalam menentukan prioritas pendidikan.

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan peran pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota bukan pemisah tanggung jawab yang membuat pemerintah bekerja sendiri-sendiri akan tetapi merka saling berkolaborasi dan melakukan koordinasi dalam hal kebutuhan pendidikan suatu wilayah berhubungan dengan lebih dari satu tingkat pemerintahan.

Perbedaan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membahas

pemerataan anggaran pendidikan. Daerah dengan basis ekonomi yang kuat berpotensi mempunyai ruang fiskal lebih besar untuk membiayai program tambahan. Sebaliknya, daerah dengan pendapatan terbatas mungkin perlu lebih banyak mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Dari perbedaan tersebut tidak otomatis berarti daerah yang memiliki pendapatan lebih besar selalu menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Kualitas pengelolaan anggaran, kondisi geografis, jumlah peserta didik, kebutuhan rehabilitasi bangunan, dan ketersediaan tenaga pendidik juga dapat memengaruhi hasilnya. Daerah yang luas dan memiliki sekolah-sekolah terpencil, misalnya, dapat menghadapi biaya pelayanan yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan yang akses transportasi lebih mudah.

Kajian Afridzal et al. (2018) relevan untuk memahami bahwa pelaksanaan anggaran daerah berkaitan dengan regulasi dan keputusan pemerintah. Sementara itu, Septiana dan Salahudin (2021) menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Jika kedua gagasan tersebut dibaca bersama, terlihat bahwa alokasi pendidikan perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan sekaligus tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini pemerataan tidak harus berarti setiap daerah memperoleh jumlah anggaran yang sama. Daerah dengan jumlah peserta didik yang lebih banyak, kerusakan fasilitas yang lebih berat, atau biaya pelayanan yang lebih tinggi mungkin membutuhkan alokasi yang berbeda. Dalam penerapannya pemerintah mengalokasikan dana dengan memandang alokasi tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Pendidikan secara wajar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki informasi yang memadai tentang kondisi sekolah. Data mengenai jumlah peserta didik, rasio guru, kondisi ruang kelas, kebutuhan fasilitas, dan hambatan akses dapat digunakan untuk memperkuat alasan penetapan prioritas anggaran. Tanpa informasi tersebut, keputusan anggaran berisiko lebih banyak mengikuti kebiasaan tahun sebelumnya daripada menjawab kebutuhan yang sedang dihadapi sekolah.

Anggaran Pendidikan dan Kebutuhan Nyata Sekolah

Anggaran pendidikan pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang diterima sekolah. Tersedianya anggaran dalam dokumen perencanaan belum tentu berarti seluruh kebutuhan sudah terpenuhi. Masih diperlukan proses pengalokasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi agar dana benar-benar mendukung kegiatan pendidikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara belanja rutin dan belanja yang langsung membantu perbaikan layanan belajar. Kebutuhan rutin, seperti pembayaran gaji dan biaya operasional, tetap penting karena memungkinkan kegiatan sekolah berlangsung. Namun, sekolah juga memerlukan dukungan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak, menyediakan bahan pembelajaran, mengembangkan kompetensi guru, dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang memerlukan layanan khusus. Pembagian anggaran sebaiknya tidak dilakukan dengan menganggap bahwa seluruh sekolah mempunyai kondisi yang sama. Sekolah yang mengalami kerusakan bangunan berat memerlukan perhatian berbeda dari sekolah yang fasilitasnya relatif baik. Begitu pula sekolah di wilayah yang sulit dijangkau mungkin menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi.

Penelitian Hasanah dan Jabar tentang evaluasi program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta serta penelitian Nugraha dan Wibowo tentang penerapan sistem informasi *e-budgeting* pada SMA negeri di Kota Yogyakarta dapat digunakan untuk memperluas pembahasan mengenai evaluasi program daerah dan pengelolaan anggaran sekolah. Kedua topik tersebut menunjukkan pentingnya menelaah hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, bukan hanya jumlah dana yang disediakan.

Pengelolaan anggaran juga perlu melibatkan pihak sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga

administrasi, komite sekolah, dan pemangku kepentingan terkait dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak. Pelibatan tersebut bukan berarti seluruh keputusan keuangan diserahkan kepada sekolah, melainkan agar perencanaan pemerintah memperoleh informasi yang lebih dekat dengan kondisi lapangan. Selain itu, transparansi perlu dijaga. Informasi tentang sumber dana, rencana penggunaan, realisasi, dan hasil kegiatan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran pendidikan digunakan. Transparansi juga mempermudah evaluasi ketika terdapat perbedaan antara program yang direncanakan dan hasil yang dicapai.

Perbandingan Penganggaran Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Perbandingan antar pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota perlu dilakukan adanya pertimbangan yaitu dalam pembagaan kewenangan dan kondisi pada masing-masing daerah. Perbandingan yang hanya dilihat dari total anggaran dapat menghasilkan Kesimpulan yang kurang tepat karena pada jumlah sekolah, jumlah peserta didik, dan jenis layanan yang menggunakan anggaran pemerintah juga berbeda-beda pada setiap daerahnya. Dalam jobdesknya pemerintahan provinsi perlu memastikan bahwasanya anggaran untuk Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus sudah sesuai dengan kebutuhan layanan dalam wilayah kewenangannya. Sedangkan wilayah kabupaten perlu melihat Sebagian besar pemerataan sekolah dasar dan layanan pendidikan lainnya, termasuk sekolah di wilayah perdesaan atau daerah yang sulit dijangkau. Dan pada pemerintah kota menghadapi kebutuhan yang berbeda yaitu jumlah peserta didik yang bertambah, kepadatan wilayah, dan kebutuhan peningkatan fasilitas sekolah.

Perbedaan karakteristik tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan bahwa salah satu jenis pemerintahan selalu lebih baik daripada yang lain. Penilaian perlu didasarkan pada data yang sebanding dan indikator yang jelas. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain: (1) Besarnya belanja pendidikan dibandingkan total belanja daerah. (2) Belanja pendidikan per peserta didik. (3) Proporsi belanja untuk kebutuhan operasional, sarana-prasarana, dan peningkatan mutu. (4) Persentase sekolah dengan ruang kelas dalam kondisi baik. (5) Kecukupan dan pemerataan tenaga pendidik. (6) Kesesuaian realisasi anggaran dengan kebutuhan yang sudah dipetakan. (7) Hasil layanan pendidikan yang dapat diukur melalui indikator akses dan mutu.

Indikator tersebut dapat membantu membedakan antara daerah yang mempunyai anggaran besar dan daerah yang menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, indikator harus ditafsirkan secara hati-hati. Belanja per peserta didik yang tinggi, misalnya, dapat terjadi karena biaya pelayanan di daerah terpencil lebih mahal, bukan semata-mata karena pengelolaan anggarannya tidak efisien.

Tantangan dan Upaya Perbaikan Penganggaran Pendidikan

Terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki penganggaran Pendidikan. pertama, data kebutuhan sekolah jika dibandingkan secara keseluruhan belum tentu bisa karena masih menggunakan format yang berbeda-beda. Kedua, perbedaan kemampuan keuangan daerah dapat membatasi ruang untuk membiayai kebutuhan tambahan. Ketiga, penyusunan anggaran berisiko lebih berorientasi pada pemenuhan administrasi daripada hasil layanan yang ingin dicapai. Keempat, koordinasi antartingkat pemerintahan perlu diperkuat agar program yang dibiayai tidak saling tumpang tindih. Kelima, pengawasan anggaran perlu dihubungkan dengan hasil pelaksanaan, sehingga evaluasi tidak hanya memeriksa apakah dana telah dibelanjakan, tetapi juga apakah belanja tersebut menjawab kebutuhan yang

telah ditetapkan.

Beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Pemerintah daerah dapat memulai perencanaan dari pemetaan kebutuhan sekolah yang diperbarui secara berkala. Setelah itu, kebutuhan tersebut dapat disusun berdasarkan tingkat urgensi, misalnya keselamatan bangunan, pemenuhan tenaga pendidik, akses peserta didik, dan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, indikator kinerja perlu ditentukan sejak awal. Jika anggaran dialokasikan untuk memperbaiki ruang kelas, indikatornya tidak cukup berupa jumlah dana yang terserap. Pemerintah juga perlu memeriksa apakah perbaikan selesai, apakah ruang kelas sudah aman digunakan, dan apakah kebutuhan sekolah telah terpenuhi.

Transparansi dan partisipasi masyarakat juga perlu dipertahankan. Masyarakat tidak harus terlibat dalam seluruh keputusan teknis, tetapi perlu memperoleh informasi yang cukup untuk memahami prioritas dan hasil penggunaan anggaran. Dengan cara ini, pengawasan publik dapat menjadi bagian dari perbaikan pengelolaan keuangan pendidikan. Pada akhirnya, penganggaran pendidikan yang baik bukan hanya anggaran yang memenuhi ketentuan atau memiliki nilai nominal besar. Anggaran yang baik adalah anggaran yang direncanakan secara masuk akal, dikelola secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi proses belajar peserta didik.

KESIMPULAN

Penganggaran pendidikan di tingkat sekolah tidak dapat dilepaskan dari pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap tingkat pemerintahan mempunyai tanggung jawab yang berbeda, sehingga perencanaan anggarannya perlu disesuaikan dengan jenis layanan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Namun, pembagian kewenangan saja belum cukup untuk menjamin pemerataan pendidikan. Perbedaan kemampuan keuangan daerah, kondisi geografis, jumlah peserta didik, dan kebutuhan fasilitas sekolah dapat memengaruhi besarnya dukungan yang diperlukan. Karena itu, pemerataan anggaran sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai pembagian dana dalam jumlah yang sama, tetapi sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidikan secara proporsional.

Penganggaran yang lebih baik dapat dimulai melalui penggunaan data kebutuhan sekolah, penentuan prioritas yang jelas, koordinasi antara pemerintah, serta pengawasan yang memperhatikan hasil penggunaan dana. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar mendukung kegiatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridzal, A., Abdullah, S., Saputra, M., & Hasnawati. (2018). Anggaran pendidikan, kepatuhan terhadap regulasi, dan intervensi: Sebuah telaah literatur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah (JENSI)*, 2(1), 32–39. <https://doi.org/10.33059/jensi.v2i1.932>
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- JahJa, Y. (2007). Kebijakan pemerintah daerah dalam anggaran sektor pendidikan. *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 15(VIII), 82–90. <https://doi.org/10.21009/PIP.151.14>
- Mushthofa, A., Munastiwi, E., & Dinana, A. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis bebas

- sumbangan pembinaan pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1), 64–76. <https://doi.org/10.21831/jamp.v10i1.46994>
- Nugraha, A. Y., & Wibowo, U. B. (2020). Manajemen sistem informasi *e-budgeting* pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 70–80. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.30596>
- Septiana, Y., & Salahudin, S. (2021). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan: Sebuah kajian pustaka terstruktur (*systematic literature review*). *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 9(1), 31–41. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v9i1.42222>
- Suryani, Y., Pertiwi, I. I., Mustafa, I. A., Mulawarman, W. G., & Haryaka, U. (2025). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. *ALSYS*, 5(3), 376–391. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i3.5461>
- Runiasih, M., & Ahmad, M. (2025). Ketimpangan pembiayaan pendidikan antar daerah di Indonesia: Kajian literatur terhadap desentralisasi fiskal dan pemerataan akses. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 839–843. <https://doi.org/10.34125/jmp.v10i2.671>